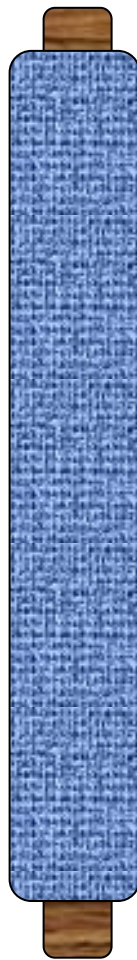


RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BIMA
TAHUN 2019



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BIMA

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2019 ini adalah merupakan pelaksanaan Rencana Starategis tahun Pertama dari periode RPJMD tahun 2019-2023. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis BPBD, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Kota Bima , Januari 2019

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	21
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
Tabel 1 MATRIK RENCANA KERJA BPBD TAHUN 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar terlampir.

Visi KOTA BIMA Tahun 2005 – 2025 adalah “Terwujudnya Kota Bima sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan”, dan **Visi Kota Bima tahun 2019-2023 : “Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA** maka untuk dapat mewujudkan Visi Kota Bima Badan penanggulangan Bencana Daerah menetapkan tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis , Renja SKPD ini diharapkan dapat terealisasi maksimal dalam Kebijakan Umum dan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4727);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2008 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028.
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 111);

20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018.
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun lalu, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima tahun 2019.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2019, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2018 *(tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

No	URUSAN /BIDANG PEMERINTAH AN DAERAH	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Resntra SKPD pada Tahun 2013-2018			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Pada Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2017)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun... %			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD sd tahun 2017	
	Program/Kegi atan		5			6		7			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100			14=6+12	
1	3	4	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	%	K	Rp	K		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya pelayanan admintrasi perkantoran	10 0	%	2.940.384.043	67	%	1.488.064.53 3,00	22	%	739.299 .700	6	%	194.903.699, 00	26,35	26,36	72,60	%
2	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa surat menyurat	60	Bulan	233.947.432	36	Bulan	152.592.000, 00	12	Bulan	79.180. 000	3	Bulan	9.540.000,00	25,00	4,08	39,00	Bulan

3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	60	Bulan	124.544.040	36	Bulan	88.993.939,00	12	Bulan	44.400.000	3	Bulan	3.821.265,00	25,00	%	3,07	39,00	Bulan
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	50	Unit	60.000.000	24	Unit	18.688.283,00	11	Unit	14.450.000	1	Unit	0,00	9,09	%	-	25,00	Unit
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	60	Bulan	295.682.203	36	Bulan	197.570.000,00	12	Bulan	83.400.000	3	Bulan	0,00	25,00	%	-	39,00	Bulan
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	60	Bulan	83.566.608	36	Bulan	62.772.500,00	12	Bulan	15.382.000	3	Bulan	3.113.000,00	25,00	%	3,73	39,00	Bulan

10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	25	Jenis	16.000.000	21	Jenis	4.830.800,00	7	Jenis	3.498.000	7	Jenis	3.498.000,00	100,00	%	21,86	28,00	Jenis
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	4200	OK	87.913.440	2.520	OK	68.995.000,00	840	OK	27.000.000	105	OK	0,00	12,50	%	-	#####	OK
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang bisa dilakukan	60	Bulan	1.605.690.140	36	Bulan	633.881.801,00	12	Bulan	360.670.800	3	Bulan	152.902.934,00	25,00	%	9,52	39,00	Bulan
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang bisa dilakukan	60	Bulan	100.000.000	36	Bulan	39.320.000,00	12	Bulan	30.000.000	3	Bulan	0,00	25,00	%	-	39,00	Bulan

15	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Porsentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.367.275.194	63	%	1.293.380.350	57	%	491.276.000	7	%	17.005.000,00	12,85	%	1,24	70,47	%
16	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	30	Paket	360.300.000	7	Paket	575.320.000	1	Paket	152.550.000	-	Paket	0,00	-	%	-	7,00	Paket
17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20	Jenis	201.468.300	10	Jenis	60.254.000	3	Jenis	21.150.000,00	-	Jenis	0,00	-	%	-	10,00	Jenis

18	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	25	Jenis	219.173.090	15	Jenis	93.617.000	5	Jenis	41.650.000	-	Jenis	0,00	-	%	-	15,00	Jenis
19	Pengadaan mebelair	Jumlah Mebeleur	15	Jenis	235.046.350	9	Jenis	92.675.000	4	Jenis	31.500.000	-	Jenis	0,00	-	%	-	9,00	Jenis
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5	Tahun	61.051.000	3	Tahun	29.750.000	1	Tahun	31.650.000	-	Tahun	0,00	-	%	-	3,00	Tahun
21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	45	Unit	237.732.594	30	Unit	386.314.350	13	Unit	172.276.000	-	Unit	14.005.000,00	-	%	5,89	30,00	Unit

22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60	Bulan	52.503.860	36	Bulan	55.450.000	33	Unit	40.500.000	4	Unit	3.000.000,00	12,12	%	5,71	40,00	Unit
23	Program peningkatan kedisiplinan aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	200.000.000	61	%	62.000.000	25	%	30.400.000,00	-	%	0,00	-	%	-	60,60	%
24	Pengadaan pakaian kerja lapangan		150	Set	50.000.000	90	-	18.000.000										90,00	
25	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Junlah pakaian khusus hari - hari tertentu	150	Set	150.000.000	90	Set	44.000.000	38	Set	30.400.000	-	Set	0,00	-	%	-	90,00	Set

26	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	310.993.794	62	%	174.218.000,00	33	%	95.390.000	20	%	0,00	60,00	%	-	81,80	%
27	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	10	Dok	60.074.184	6	Dok	25.219.000,00	2	dok	7.220.000	-	dok	0,00	-	%	-	6,00	dok
28	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	15	Dok	60.074.184	9	Dok	27.964.500,00	3	Dok	12.080.000	-	Dok	0,00	-	%	-	9,00	Dok

29	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	20	Dok	133.335.384	12	Dok	4	dok	51.650.000	-	dok	0,00	-	%	-	12,00	dok
										89.110.000,00								
30	Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD	Jumlah Dokumen Lakip, LPJ dan LPPD	15	Dok	57.510.042	9	Dok	3	dok	24.440.000	3	dok	0,00	100,00	%	-	12,00	dok
										31.924.500,00								
31	Program penataan peraturan perundang-undangan	Jumlah aturan Daerah	10	Dok	150.721.000	7	Dok	1	dok	31.570.000,00	-	%	0,00	-	%	-	7,00	%
32	Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah	Jumlah Dokumen yang disusun dan dilegalisasi	10	Dok	150.721.000	7	Dok	1	Perwali	31.570.000	-	Perwali	0,00	-	%	-	7,00	Perwali

33	Program penyuluhan dan penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang terlatih	1460	Orang	2.276.977.867	1.092	Orang	1.798.943.529	380	Orang	##### ##### ###	-	%	0,00	-	%	-	#####	%
34	Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait;	Jumlah Personil SKPD terkait terlatih	200	Orang	238.440.785	80	Orang	222.745.121	40	Orang	64.208.300	-	Orang	0,00	-	%	-	80,00	Orang
35	Diklat dan Penyuluhan kepada anggota masyarakat (tatap muka, brosur, leaflet)	Jumlah personil pada Cifitas Pendidikan terlatih	620	Orang	324.870.000	440	Orang	114.144.200	20	orang	65.482.200	-	orang	0,00	-	%	-	440,00	orang

36	Diklat dan penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC,TAGANA, TIM SAR, TIM PEMADAM KEBAKARAN)	Jumlah Tim Penanggulangan bencana terlatih	310	Orang	463.667.082	50	Orang	48.337.500	120	Orang	97.982.700	-	Orang	0,00	-	%	-	50,00	Orang
37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Lembaga dan Personilnya terlatih	20	Lembaga	1.250.000.000	12	Lembaga	1.413.716.708	4	Lembaga	851.439.500	-	Lembaga	0,00	-	%	-	12,00	Lembaga
38	Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana	Persentase pengurangan risiko akibat bencana	100	%	3.033.951.648	34	%	1.045.455.000	36	%	200.500.000	-	%	0,00	-	%	-	34,38	%

39	Mitigasi Bencana	Jumlah sarana dan prasarana	32	Paket	3.033.951.648	11	Paket	1.045.455.000	4	paket	200.500.000	-	paket	0,00	-	%	-	11,00	paket
50	Program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	90	%	108.102.000	54	%	88.018.000	18	%	40.000.000,00	-	%	0,00	-	%	-	54,00	%
41	Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana	10	Jenis	108.102.000	6	Jenis	88.018.000	2	Jenis	40.000.000	-	Jenis	0,00	-	%	-	6,00	Jenis
41	Program pengkajian secara cepat dan tepat	Jumlah Dokumen	5	Dok	317.441.241	3	Dok	79.447.500	2	dok	85.042.500,00	-	dok	0,00	-	%	-	3,00	dok

43	Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban	Jumlah Data	5	Dok	164.288.241	3	Dok	79.447.500	1	dok	45.730.000	-	dok	0,00	-	%	-	3,00	dok
44	Analisa kerusakan sarana dan prasarana	Jumlah Dokumen	5	Dok	153.153.000	-	Dok	-	1	dok	39.312.500	-	dok	0,00	-	%	-	-	dok
45	Program pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Kebutuhan dasar	100	%	805.873.000	64	%	197.989.500	31	%	90.390.000,00	-	%	0,00	-	%	-	64,00	%
46	Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi	Jumlah air bersih dan Sanitasi	40	Titik	732.612.000	24	Titik	121.041.000	8	titik	51.330.000	-	titik	0,00	-	%	-	24,00	titik

50	Monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Laporan Monev	5	Dok	270.455.930	3	Dok	189.669.000,00	1	dok	83.230.000	-	dok	2.070.000,00	-	%	0,77	3,00	dok
51	Program Rekonstruksi	Prosentase Rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	40	%	50.300.000.000	0,71	%	967.799.424	9,00	%	12.052.315.000	-	%	0,00	-	%	-	0,71	%
52	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	100	Keg	300.000.000	71	Keg	899.544.800	20	Keg	52.315.000	-	Keg	0,00	-	%	-	71,00	Keg
53	Pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana umum	50	Paket	50.000.000.000	-	Paket	68.254.624	11	Paket	12.000.000.000	-	Paket	0,00	-		-	-	Paket

54	Program Kesiapsiagaan	Persentase ketersediaan system kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100	%	1.762.632.022	54	%	1.012.130.000	13	%	536.866.100,00	-	%	0,00	-	%	-	54,13	%
55	Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana		1	Dok	50.000.000	1	Dok	11.709.500	0									1,00	
56	Gladi tentang mekanisme tanggap darurat	Jumlah SDM terlatih dan mekanisme kedaruratan yang teruji	100	Orang	330.194.333	50	Orang	97.579.500	30	Orang	40.787.900	-	Orang	0,00	-	%	-	50,00	Orang
57	Pembentukan Kelurahan Tangguh	Jumlah kelurahan	38	Kel	1.432.437.689	20	Kel	902.841.000	5	Kel	496.078.200	-	Kel	0,00	-	%	-	20,00	Kel

		tangguh bencana																	
58	Program Peringatan dini	Persentase ketersediaan system peringatan Dini bencana	100	%	729.892.805	68,77	%	364.238.726	23	%	264.985.300,00	9	%	12.250.000,00	37,17	%	1,68	77,34	%
59	Mengamati gejala bencana	Jumlah data hasil pengamatan	5	Dok	116.025.000	1	Dok	23.759.726	1	dok	82.110.300	-	dok	0,00	-	%	-	1,00	dok
60	Menyebar luaskan informasi potensi bencana	Jumlah jenis penyebaran informasi	35	Paket	613.867.805	24	Paket	340.479.000	8	jenis media penyebaran	182.875.000	3	jenis media penyebaran	12.250.000,00	37,50	%	2,00	27,00	jenis media penyebaran

			87, 14	%	103.647.340.54 4,00	52, 05	%	9.841.889.06 2,00	26,05	%	##### ##### ###	2,98	%	226.228.699, 00	11,44	%	0,22	55,03	%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1. Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bima

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang- Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

**Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bima
Periode tahun 2016 dan tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018**

VISI	MISI	TUJUAN MISI	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN MISI			TARGET				TARGET PENCAPAIAN						
					SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	2015	2016	2017	2018	Target Renstra	Capaian tahun sebelumnya (2016)	% Capaian tahun sebelumnya	capaian tahun 2017	% Capaian tahun 2017	Capaian sampai dengan tahun 2017	% Capaian sampai dengan tahun 2017
1	2	3			4	5	6	9	10	11	12	14			15			16
TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG TANGGUH DAN MANDIRI MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT	Meningkatkan Kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan peran serta stakeholder penanggulangan bencana dalam Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatkan ketangguhan Kota terhadap bencana	Kriteria Kota Tangguh	Pratama	Meningkatkan Peran aktif Masyarakat dalam Penanganan Risiko Bencana	Persentase Kelurahan Tangguh bencana	Persentase Kelurahan tangguh Bencana pratama	39	53	66	100	100	53	100	68,4	103,6	68,4	68,4
	Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Tim Penanggulangan bencana	Persentase SDM terlatih	70%	Meningkatnya kapasitas aparatur dan tim penanggulangan bencana	Jumlah SDM yang terlatih	Jumlah SDM yang terlatih	180	180	180	180	870	692	384,44	335	186,1	1027	118,05

Meningkatkan Koordinasi dalam Penanganan Bencana dengan Instansi terkait.	Terwujudnya Penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh	Persentase keselarasan pedoman penanggulangan bencana	70%	Tersedianya pedoman dalam penanggulangan bencana yang terencana terpadu dan menyeluruh	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersedia	tersedianya Dokumen RPB, Dok Renkon setiap bencana, SOP Kedaruratan dll	2	1	1	2	9	1	100,00	1	100	8	88,89
Terwujudnya Penanggulangan kedaruratan secara cepat, tepat, efektif terkoordinir dan terpadu	Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara tepat dan cepat	persentase penanggulangan kedaruratan bencana	100%	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Porsentase Pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana	Jumlah Korban bencana yang dapat dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah Korban Bencanax 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang saat bencana	Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang saat bencana yang tersedia dibagi jumlah sarana prasarana yang harus ada x 100%			80	85	85	70	70,00	80	100	80	94,12

Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh	Terselenggaranya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana		90	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Porsentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencan	Jumlah sarana dan prasarana yang bisa ditangani/jumlah sarana dan prasarana yang terdampak bencana x 100	60	70	80	90	90	22	22,00	32	32	32	35,56
													125,35		103,11		86,43

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

Tingkat kinerja pelayanan BPBD selama dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan melebihi target tahun yang berkenaan, tingkat capaian kinerja BPBD selama tahun 2017 rata – rata sebesar 103,11 %, sedangkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 125,35 tingkat capaian ini sangat tinggi karena tingginya capaian pada beberapa item indikator seperti capaian indikator pada Jumlah SDM terlatih tercapai hingga 200 % dari target. Capaian tahun 2013 sebesar 121% melampaui target tahun yang bersangkutan . Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama tahun 2017 didukung oleh 41 pegawai yang terdiri dari 30 Pegawai Negeri Sipil dan 12 pegawai tidak tetap. Jumlah pegawai, pendidikan, golongan dan jabatannya sesuai tabel berikut ;

1. Jumlah PNS dan Non PNS Badan penanggulangan Bencana berjumlah 39 orang dengan rincian sesuai table berikut :

Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	29	74,36
2	CPNSD	-	
3	Honorer	10	25,64
	Total	39	100

2. Susunan Pegawai berdasarkan :

- a. Golongan :

Tabel 3.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS/NON PNS	CPNS
1	Golongan IV	4	-
2	Golongan III	19	-
3	Golongan II	6	-
4	Golongan I	0	-
5	Non Golongan	10	

	Total	39	-
--	-------	----	---

b. Jabatan Struktural :

Tabel 3.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
	Jumlah	14

c. Tingkat Pendidikan :

Tabel 3.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	S3	-	
2	S2	4	10,26
3	S1	17	43,59
4	D3	2	5,13
5	SMA/Sederajat	16	41,03
6	SMP/Sederajat	0	0
7	SD/Sederajat	0	0
	Total	39	100

Berdasarkan analisa kebutuhan personil bagi instansi, jumlah personil tersebut masih terbatas untuk melayani kebutuhan masyarakat , Analisa kebutuhan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Analisa Kebutuhan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jabatan	Sudah Terisi	Belum Terisi	Keterangan
1.	Kepala Pelaksana	√		
2.	Sekretaris	√		

	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	√		
	Staf	√		Kurang 2 org
	b. Kasubag Keuangan	√		
	Staf	√		Cukup
	c. Kasubag Program	√		
	Staf	√	√	Kurang 1 org
3.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	√		
	a. Kasi Pencegahan	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
	b. Kasi Kesiapsiagaan	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
4.	Kabid Kedaruratan dan Logistik		√	
	a. Kasi Tanggap Darurat	√		
	Staf	√		Kurang 1 org
	b. Kasi Logistik	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
5.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi		√	
	a. Kasi Rehabilitasi	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
	b. Kasi Rekonstruksi	√		
	Staf		√	Kurang 2 org

2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang terlatih dalam pelaksanaan Program kerja BPBD;

2. Kurangnya Tenaga /Personil sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa diselesaikan dengan cepat sehingga menghambat semua kegiatan;
3. Koordinasi dengan beberapa Stakeholder masing sangat kurang terutama pada penyelesaian tugas – tugas pasca bencana
4. Kurangnya sarana prasarana pendukung

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

1. Koordinasi yang masih parsial dengan beberapa stakeholder sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
2. Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal terutama pada fungsi pemadam kebakaran;
3. Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas belum terwujud dengan baik;
5. Keterlambatan pencairan dana terutama dana tak tersangka sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan kedaruratan bagi korban bencana.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan.
2. Belum adanya pemahaman yang sama terhadap penanggulangan bencana menyebabkan terhambatnya pencapaian sasaran yang ingin dicapai yaitu masyarakat yang mandiri

4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Tantangan

- Terjadinya ancaman bencana yang cukup tinggi
- Terjadinya bencana banjir yang cukup besar sehingga menyebabkan kerusakan dan kerugian hampir di semua sektor
- Sarana Prasarana pendukung kelancaran pekerjaan pelayanan kurang memadai
- Pendanaan masih kurang memadai
- Masih adanya ego sektoral atau penanganan masih sektoral

Peluang

- Semangat mau bekerja sangat tinggi
- Adanya komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana yang terbukti dengan lahirnya Perda Penanggulangan Bencana yang tertuang di dalamnya komitmen pemerintah untuk menyediakan dana minimal 1 % dari belanja langsung APBD untuk anggaran penanggulangan bencana

- Kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu peluang eksternal untuk membuka wawasan pemikiran bagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitasnya
- Adanya dukungan dari SKPD terkait dalam menyelesaikan tugas tugas pelayanan kedaruratan
- Terbentuk dan aktifnya Forum PRB " Matenggo" Kota Bima dan TSBK di 20 Kelurahan.
- Mulai adanya keikutsertaan Lembaga usaha dalam rangka penanggulangan bencana yang dulu hanya focus pada tanggap darurat akan tetapi sekarang mulai memperhatikan program – program penanganan pra dan pasca bencana
- Mulai banyaknya perhatian Kementerian/ lembaga dan perguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk menata kembali Kota pasca bencana banjir

Kekuatan

- Dukungan dan persetujuan Pemerintah terhadap rencana program dan Kegiatan;
- Koordinasi yang relative baik antara Instansi terkait dilingkungan pemerintah Kota Bima melalui Tim Teknis dan Tim Koordinasi SKPD Terkait Kota Bima;
- Personil Pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan penuh tanggung jawab;
- Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2010 tentang pembentukan BPBD Kota Bima
- Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bima
- Adanya legalisasi Peraturan walikota Bima tentang pemanfaatan dana tak terduga
- Adanya legalisasi peraturan Walikota Bima tentang pedoman Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana minimal 1% dari belanja langsung APBD
- Adanya Legalisasi Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

Kelemahan

- Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan BPBD terutama kegiatan Pasca Bencana
- Kurangnya Kuantitas dan kualitas keterampilan Pegawai, baik yang Profesional secara Teknis maupun Operasional;
- Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara optimal.
- Masih Kurangnya aturan – aturan turunan daerah tentang penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana

5. Isu-Isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

- Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal penanggulangan bencana
- Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam usaha – usaha pengurangan risiko bencana

- Masih kurangnya legitimasi hukum peraturan – peraturan turunan Peraturan daerah Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam mengatur tata kelola manajemen pengurangan resiko bencana di Daerah
- Masih kurangnya dokumen pendukung sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan bencana
- Terbatasnya anggaran Penanganan Pasca Bencana mengingat biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sangat besar

6. Rekomendasi – rekomendasi dan catatan strategis

- Perlunya peningkatan SDM aparatur, Tim Penanggulangan Bencana dan masyarakat melalui Pelatihan structural, pelatihan fungsional, penyuluhan penanggulangan bencana dan pelatihan dan gladi/simulasi bencana.
- Mendorong pelaksanaan Rencana aksi daerah penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana banjir tanggal 21 dan 23 Desember 2016 dalam rangka meningkatkan komitmen semua pihak baik swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana (Pra bencana , Tanggap darurat dan pasca bencana);
- Memperbesar anggaran penanggulangan bencana terutama pada program – program Pengurangan Risiko Bencana karena investasi yang besar pada program pengurangan risiko bencana akan dapat menghemat anggaran 4 – 7 kali lipat dibandingkan biaya yang keluar untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian jika bencana telah terjadi
- Perlunya pengintegrasian yang maksimal terhadap program Pengurangan Risiko Bencana kedalam RKPD Kota Bima sebagai upaya mengurangi dampak bencana mengingat tingginya ancaman bencana di Kota Bima terutama bencana banjir dan tanah longsor
- Terus melakukan program menuju ketangguhan bencana sebagai upaya peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat ditingkat paling bawah dalam upaya – upaya pengurangan risiko bencana.
- Terus melakukan koordinasi sektoral untuk meningkatkan upaya – upaya baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2013 – 2018 yang telah berakhir pada tahun 2018, artinya Rencana kerja pemerintah Daerah pada tahun 2018 telah merampungkan hasil capaian pada RPJMD 2013 - 2018, sementara RPJMD 2019-2023 disusun berdasarkan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih dengan menyesuainya dengan Rencana Pembangunan selanjutnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD tersebut selanjutnya menjadi acuan penyusunan Renstra SKPD yang kemudian setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD dan menjadi acuan penyusunan RKPD . Terkait dengan Program kerja pemerintah daerah di bidang penanggulangan

bencana, RPJMD tahun 2019-2023 secara signifikan telah menetapkan Program Pengurangan Risiko Bencana pada Program prioritas Daerah, Di Dalam dokumen Draf RPJMD tahun 2019-2023 telah menuangkan program penanggulangan bencana pada misi ke 4 yaitu **MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERKUALITAS DAN RAMAH, MELALUI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERKOTAAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA** hal ini menjadi catatan bagi BPBD sebagai leading sector terkait penanggulangan bencana harus berjuang keras untuk mendukung dengan langkah – langkah program yang sangat strategis dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat dalam rangka kemandirian masyarakat baik sebelum, saat bencana maupun pasca bencana.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sampai dengan tahun 2019 Badan Penanggulangan bencana daerah telah banyak menerima usulan program dan kegiatan Masyarakat baik yang secara langsung melalui tatap muka dengan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan Pembentukan kelurahan tangguh maupun melalui Surat dan Proposal, Hasil kunjungan Dewan dan Pertemuan Forum SKPD. Berdasarkan hasil pertemuan forum SKPD dalam rangkaian musrembang untuk sinkronisasi program butem up dan top down, sebagian besar program yang diajukan masyarakat dapat terakomodir dalam program Renja BPBD ini mengingat isu – isu yang diangkat hampir sama namun belum terpenuhi hingga 100%. Selain itu program pembentukan kelurahan tangguh yang dilaksanakan sejak tahun 2014 telah melahirkan Dokumen rencana aksi masyarakat, dimana dokumen tersebut memuat program dan kegiatan pengurangan risiko bencana terutama pada kelurahan yang telah terbentuk menjadi kelurahan tangguh. Sebagian besar rencana aksi masyarakat tersebut telah disampaikan melalui musrembang tingkat Kelurahan maupun tingkat kecamatan dan menjadi issue penting yang ditindak lanjuti BPBD melalui rencana kerja ini.

Program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat adalah antara lain :

1. Program Penanganan bencana banjir yang kerap terjadi dan sering menggenangi disebagian besar Wilayah Kota Bima;
2. Perbaikan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat banjir bandang
3. Perbaikan Drainase di Sebagian besar Wilayah Kota Bima.
4. Pembuatan sumur resapan di beberapa lokasi rawan banjir dan kekeringan.
5. Normalisasi sungai Padolo, sungai romo, Sungai Dodu dll.
6. Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui Pembentukan Kelurahan tangguh dan pengembangannya.
7. Penanganan darurat bencana yang terjadi seperti banjir, kekeringan, kebakaran, angin kencang dll
8. Penghijauan di daerah hulu

Program dan kegiatan yang bersifat fisik adalah merupakan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan SKPD teknis seperti Dinas PU Pertamben, Dinas kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota dan Perumahan dan dinas teknis terkait lainnya, sehingga tugas BPBD Kota bima adalah mengkoordinasikan tugas tugas tersebut dengan SKPD terkait sedangkan tugas penanggulangan bencana non fisik didorong untuk masuk menjadi rencana kerja BPBD tahun 2019 yang tertuang dalam matriks rencana kerja ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan berjalannya upaya – upaya penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana sehingga terbentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk di Tingkat Daerah bertugas mengurus dan merencanakan program – program penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan berpedoman pada aturan – aturan yang sudah ada.

Berdasarkan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional terdapat 7 (Tujuh) point, poin yang ke empat adalah **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim**. Arah kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. arah kebijakan tersebut menjadi pedoman rujukan dalam penyusunan program – program yang tertuang di dalam RPJMN Daerah maupun Rencana Strategis SKPD BPBD dan Instansi yang terkait lainnya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.2.1. Tujuan

Sesuai dengan rancangan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2013-2023 maka tujuannya adalah " *Meningkatkan ketahanan Kota/berkurangnya risiko bencana* "

3.2.2. SASARAN STRATEGIS

Di dalam mewujudkan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ditempuh melalui 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu :

- a. Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana
- b. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana
- c. Tercapainya upaya pemulihan sarana prasarana fisik, ekonomi dan sosial pasca bencana

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Rencana Kinerja BPBD

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dan sebagai tolok ukur pencapaian program dan kegiatan tahun 2019 maka ditetapkan rencana kinerja BPBD tahun 2019-2023 sesuai tabel berikut :

RENCANA KINERJA BPBD TAHUN 2019-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan ketahanan Kota/berkurangnya risiko bencana	Indek ketahanan daerah Kota Bima	Tinggi (91)	Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	Cakupan kelurahan yang telah memiliki sistem kesiapsiagaan terhadap bencana hingga pada level Utama	44,15 %	52,93%	58,29 %	63,66 %	69,02 %
2					Prosentase wilayah yang telah diintervensi upaya pencegahan krisis air	9,09%	31,3%	54,5%	77,3%	100%
3.				Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kedaruratan	>75%	>80%	>85%	>90%	>90%

4.				Tercapainya upaya pemulihan sarana prasarana fisik, ekonomi dan sosial pasca bencana	Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	57,6%	79,2%	100%	0%	0%
----	--	--	--	--	---	-------	-------	------	----	----

3.3.2. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan rencana kinerja dan indikator kinerja kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima serta telaahan isu – isu strategis serta rekomendasi - rekomendasi dan catatan strategis maka dapat tindak lanjuti melalui 15 program dan 45 kegiatan selama tahun 2016

Program pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Program Kesiapsiagaan dan pencegahan
5. Program Program Penigkatan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik
6. Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Program dan kegiatan dapat dilihat pada Matrik Recana Kerja BPBD Kota Bima Tahun 2019 pada lampiran RENJA ini.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BPBD Kota Bima dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Dalam melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Kerja ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dengan penganggaran yang sesuai dengan peruntukannya sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Kota Bima, Januari 2019

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bima

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA BIMA

Ir. H. SARAFUDDIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640715 199203 1 017



MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BIMA

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF/SUMBER ANGGARAN			LOKASI			
						HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		APBD II	APBD I	APBN				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	05	1.05.3	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Penyerahannya	100%											
1	05	1.05.3	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	Pengadannya surat menyurat yang memadai	12 Bulan	142,750,000						
1	05	1.05.3	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Tersedianya Kelancaran Komunikasi	12 Bulan	73,900,000						
1	05	1.05.3	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, stnk dan bpkb)	8 Kendaraan roda 4 & 9 Kendaraan roda 2	Tidak adanya Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas	8 Kendaraan roda 4 & 9 Kendaraan roda 2	15,350,000						
1	05	1.05.3	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Desakons	12 Bulan	160,944,000						
1	05	1.05.3	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	20,635,000						
1	05	1.05.3	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	39,195,500						
1	05	1.05.3	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	37,790,000						
1	05	1.05.3	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	6 Jenis komponen	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	6 Jenis komponen	14,293,000						
1	05	1.05.3	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Tersedianya peralatan makan dan minum (pecah belah)	1 Paket peralatan dapur umum	Tersedianya peralatan makan dan minum (pecah belah)	1 Paket peralatan dapur umum	4,475,000						
1	05	1.05.3	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			Tersedianya penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	62,500,000						
1	05	1.05.3	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Terlaksananya kegiatan rapat - rapat koordinasi di tingkat provinsi dan pusat	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan rapat - rapat koordinasi di tingkat provinsi dan pusat	12 Bulan	400,000,000						
1	05	1.05.3	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah							30,000,000						
1	05	1.05.3	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	% Penyediaan dan	70%					1,215,277,000		-		3,000,000,000		
1	05	1.05.3	02	03	Pembangunan gedung kantor			Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 Paket gedung gudang ukuran 20 m x 40 m, dan 1 Paket Garasi dan tempat parkir, 1 Paket Pagar halaman, Penataan halaman kantor	Tersedianya Gedung Gudang yang memadai	1 Paket gedung gudang ukuran 20 m x 40 m	800,000,000				3,000,000,000		
1	05	1.05.3	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	4 Jenis	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	4 Jenis	21,150,000						
1	05	1.05.3	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Terpenuhinya peralatan gedung kantor	3 Jenis	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	3 Jenis	65,450,000						
1	05	1.05.3	02	10	Pengadaan mebeleur			Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	3 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	3 Jenis	52,950,000						
1	05	1.05.3	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				1 tahun		1 tahun	70,000,000						Rehab ringan

1	05	1.05.3	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	8 Kendaraan roda 4 & 9 Kendaraan roda 2	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	8 Kendaraan roda 4 & 9 Kendaraan roda 2	181,277,000			
1	05	1.05.3	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Tersedianya peralatan kantor yang memadai	12 Bulan	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	12 Bulan	24,450,000			
												-			
												-			
1	05	1.05.3	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan	% Terlaksanaan	100%					157,860,000			
1	05	1.05.3	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Tersedianya Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen	9,540,000			
1	05	1.05.3	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun (Neraca, CALK, LRA)	3 Dokumen	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun (Neraca, CALK, LRA)	3 Dokumen	17,580,000			
1	05	1.05.3	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja			Tersedianya Dokumen Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD	5 Dokumen	Tersedianya Dokumen Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD	4 Dokumen	73,360,000			
1	05	1.05.3	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD			Tersedianya Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	57,380,000			
1	05	1.05.3	07		Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan							1,312,388,100			
1	05	1.05.3	07	01	Mitigasi Bencana							273,503,000			
1	05	1.05.3	07	02	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Bencana							282,680,300			
1	05	1.05.3	07	03	Peningkatan Integrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program							207,255,500			
1	05	1.05.3	07	04	Pembentukan Kelurahan Tangguh							439,989,800			
1	05	1.05.3	08	05	Diklat dan Penyuluhan Penanggulangan Bencana							108,959,500			TOT JITU Pasna
1	05	1.05.3	08		Program Peningkatan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik							634,863,700			
1	05	1.05.3	08	01	Manajemen Logistik dan Peralatan							120,796,900			
1	05	1.05.3	08	02	Pemenuhan Kebutuhan Dasar							278,290,000			
1	05	1.05.3	08	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemukiman Kedaruratan Bencana							30,000,000			
1	05	1.05.3	08	04	Gladi Mekanisme Kedaruratan							141,756,800			
1	05	1.05.3	08	05	Pengelolaan Pusdalops							64,020,000			
1	05	1.05.3	9		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi							28,054,834,801			
1	05	1.05.3	09	01	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana							105,755,000			
1	05	1.05.3	09	03	Pembangunan Rumah Masyarakat							27,879,039,801			Mobil tangki usul dimasukkan pada DPA Bag Umum
1	05	1.05.3	09	06	Monitoring dan Evaluasi							70,040,000			

					Total Belanja Langsung								3,345,151,400	214,809,500	196,512,385,000

Kota Bima, Desember 2018

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA BIMA

I. H. SARAFUDDIN, MM
PAMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640715 199203 1 017

